

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu masalah yang harus kita selesaikan bersama, artinya hal ini merupakan perhatian serius bagi negara-negara diseluruh dunia terutama di negara berkembang. Kemiskinan sudah merupakan penyakit sosial ekonomi semua negara seperti Indonesia. Dari dulu sampai sekarang pemerintah belum mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah kemiskinan. Seperti kita ketahui, pemerintah selama ini telah berupaya dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan juga telah berupaya dalam melaksanakan program-program pembangunan dari berbagai kebijakan dan strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, pucuk dari permasalahan kemiskinan masih belum bisa dipecahkan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah secara secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat (M. Nasir, dkk 2008).

Masalah kemiskinan sering kali muncul apabila seorang individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal dari standar hidupnya. Kemiskinan juga merupakan suatu keadaan dimana yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai aspek kehidupan.

Hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

Penurunan jumlah kemiskinan hingga 5,0 - 6,0 persen pada akhir tahun 2019 adalah salah satu target pertama dalam hal agenda pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya agenda tersebut, pemerintah akan merumuskan untuk memprioritaskan pembangunan nasional 2015-2019 dalam penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan yang sudah diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin dalam menjalani kehidupan secara layak.

Menurut Suryawati, Kemiskinan merupakan suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis (Suryawati, 2005). Menurut BPS (2007), seseorang yang masuk dalam kategori miskin jika pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Artinya kemiskinan dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu: ukuran pendapatan dan ukuran non pendapatan (Bappenas, 2009 : 1).

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya pertumbuhan harus merata ditiap daerah. Sekarang ini, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditentukan dari kemampuan dan keterampilan dalam mengatasi masalah kemiskinan (Todaro & Smith, 2006).

Pemerintahan pada saat itu menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi tujuan utama untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, hal itu kemudian di jelaskan dalam prinsip *triple track strategy* : *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-poor*. Track pertama: meningkatkan pertumbuhan dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Track kedua: menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan Track yang ketiga: merevitalisasi kehutanan, pertanian, kelautan dan ekonomi perdesaan untuk menurunkan angka kemiskinan (Susilo Bambang Yudhoyono, 2006).

Tabel.1.1
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | Tingkat Kemiskinan (%) |
|--------------|---|-------------------------------|
| 2010 | 577,3 | 16.83 |
| 2011 | 560,9 | 16.08 |
| 2012 | 565,3 | 16.05 |
| 2013 | 550,2 | 15.43 |
| 2014 | 544,9 | 15.00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Pemerintah sampai saat ini terus berusaha menggiatkan program-program pengentasan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dari pengeluaran per kapitanya per bulan secara perlahan dapat dimaksimalkan penurunannya walaupun terjadi naik dan turun. Dari Tabel.1, dari tahun 2010 sampai 2014 jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinannya mengalami naik dan

turun. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 sebanyak 560,9 ribu orang (16,08 persen). Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 577,3 ribu orang (16,83 persen). Dan pada tahun 2012 terjadi kenaikan lagi sebanyak 565,3 (16,05 persen) dan setelah itu terjadi penurunan lagi pada tahun 2013 sampai 2014.

Walaupun terjadi kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun tapi pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami penurunan yang positif. Hal ini berarti ada penurunan jumlah penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2016). Walaupun data di Badan Pusat Statistik di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan kota pelajar dan kota wisata ini merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Provinsi ini merupakan daerah paling miskin yang berada di urutan pertama di pulau Jawa. Dari data Badan Pusat Statistik September 2012 sebanyak 15,88 persen penduduk miskin kota dan desa di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara umum, ada terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 16,14 persen pada September 2011, akan tetapi tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih yang tertinggi di antara provinsi di Jawa. Ada beberapa aspek yang menyebabkan tingginya kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu ketidakmampuan

masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, kurang terampil dan kurang produktif untuk melakukan usaha dan bekerja.

Tabel.1.2
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2009-2014 (%)

| Kabupaten/Kota | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kulonprogo | 24,65 | 23,15 | 23,62 | 23,32 | 21,39 | 19,02 |
| Bantul | 17,64 | 16,09 | 17,28 | 16,97 | 16,48 | 15,89 |
| Gunungkidul | 24,44 | 22,05 | 23,03 | 22,72 | 21,70 | 20,83 |
| Sleman | 11,45 | 10,70 | 10,61 | 10,44 | 9,68 | 9,50 |
| Yogyakarta | 10,05 | 9,75 | 9,62 | 9,38 | 8,82 | 8,67 |
| DIY | 16,86 | 15,63 | 16,14 | 15,88 | 15,03 | 14,55 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Bila dilihat dari Tabel 1.2, tingkat kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa. Persentase penduduk miskin diperdesaan memang terlihat tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Walaupun begitu, dilihat dari penurunan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan khususnya di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2012 sebesar 23,32 persen turun menjadi 21,39 persen pada tahun 2013. Sementara di daerah perkotaan khususnya kota Yogyakarta persentase penduduk miskin pada tahun 2012 sebesar 9,38 persen turun menjadi 8,82 persen pada tahun 2013.

Masih tingginya tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat posisinya dari tahun ke tahun tidak bergerak.

Meskipun dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, tapi tidak bisa menggesernya dari daerah yang termiskin di pulau Jawa. Terbukti provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami penurunan dan peningkatan, untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah pusat dan daerah telah banyak membuat program-program pengentasan kemiskinan dan telah memberikan hasil yang positif, adapun bantuan dari pemerintah, yaitu : beras miskin (Raskin), asuransi kesehatan untuk keluarga miskin, biaya pendidikan gratis, bantuan langsung tunai, program keluarga harapan dan lain-lain. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan tapi program pengentasan kemiskinan ini hanya bersifat sementara.

Masih tingginya tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu untuk menangani masyarakat miskin yang ada di daerah kota maupun perdesaan. Sejalan dengan adanya otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan untuk merencanakan dan juga melaksanakan kebijakan maupun program-program pembangunan yang dibutuhkan di beberapa daerah yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 adalah Undang-undang otonom pertama. Dalam berjalannya waktu, Undang-undang yang mengatur otonomi daerah mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2014 dan perubahan kedua terjadi pada Tahun 2014, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang didalamnya berbunyi, otonomi daerah adalah hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan program pembangunan tetapi juga bertanggung jawab langsung dalam pengentasan kemiskinan, sehingga bisa dikaji, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Suatu pembangunan memerlukan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, cepat namun efisien. Salah satu syarat untuk menurunkan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Apabila disetiap wilayah pertumbuhan ekonomi meningkat maka mampu mengurangi kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bisa menjadi solusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan disuatu wilayah tertentu, tetapi harus diiringi juga dengan pendistribusian yang merata keseluruh pelosok wilayah (Todaro & Smith, 2006).

Kemiskinan juga tidak bisa lepas dari faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh dalam produktifitas dan keterampilan seseorang, hal ini termasuk dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemiskinan juga berpengaruh dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat pengangguran, yang menjadi faktor penghambat karena laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali dan diiringi dengan penghambatan jumlah

lapangan kerja yang sedikit, maka akan terjadi pengangguran yang akan memberikan efek buruk dalam kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor tadi merupakan permasalahan kemiskinan yang dinilai buruk dan perlu dikaji. Untuk memahami dari permasalahan kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka faktor-faktor seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran dapat dijadikan permasalahan untuk penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat pada latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

- Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Yogyakarta?
- Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan Yogyakarta?
- Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan tersebut adalah: Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Membantu memberikan informasi kepada pengambil kebijakan, terutama untuk memberikan masukan bagi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih mendalam tentang kemiskinan

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran pokok rencana dari pembahasan ini, sebagai berikut dapat diuraikan atas lima bab sesuai dengan judul tugas akhir/skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan kajian pustaka yang meliputi hasil penelitian-penelitian terdahulu, landasan teori tentang permasalahan yang akan diteliti dan keterkaitan teori dengan permasalahan yang diteliti. Ketiga komponen ini diformulasikan dalam bentuk hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian mengenai jenis dan cara pengumpulan data, definisi operasional variable serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang keadaan data serta menganalisa masalah yang diteliti dengan teknik yang telah ditentukan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran atau masukan untuk penelitian serta saran atau masukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan. Artinya kemiskinan suatu permasalahan yang kompleks yang harus dihadapi seluruh negara-negara di dunia. Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian dari kemiskinan adalah seseorang yang tidak mempunyai banyak uang, atau bisa diartikan serba kekurangan atau penghasilannya dibawah pengeluaran perkapita. Fenomena ini terjadi karena rendahnya penghasilan masyarakat dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini bisa kita lihat pada suatu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan dampaknya akan terjadi ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu ketimpangan sosial.

Masyarakat miskin pada umumnya tidak banyak keterampilan untuk berusaha dalam melakukan kemampuan aktivitas dan terbatasnya akses untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi sehingga tertinggal dari masyarakat yang mempunyai keterampilan dan kemampuan yang tinggi. Oleh karena itu, kemiskinan juga merupakan masalah kemanusiaan yang kaitannya dengan kesejahteraan dan juga kemakmuran.

Bagi masyarakat miskin, masalah yang sering muncul sepenuhnya tidak disadari keberadaannya dan beban yang sehari-hari menghantui mereka. Kesadaran itu biasanya akan terasa pada waktu mereka menjalani kehidupan dengan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan yang layak. Menurut Suparlan (1984), kemiskinan ialah suatu gambaran umum dari suatu tingkatan hidup yang rendah dan dengan adanya tersebut tingkat kekurangan materi dari sejumlah orang atau golongan yang bisa dibandingkan dengan umumnya kehidupan standar masyarakat.

Kehidupan dengan standar yang rendah ini secara langsung bisa berpengaruh terhadap tingkat keadaan atau situasi dimana harga diri dan kesehatan moral diri mereka yang tergolong dalam masyarakat miskin.

2.1.2. Jenis-jenis Kemiskinan

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan struktural.

- Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut selain dapat dilihat dari pemenuhan untuk kebutuhan dasar minimum, juga bisa dilihat dari tingkat pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum seseorang merupakan pembatas antara situasi yang sering disebut dengan garis kemiskinan. Seseorang yang termasuk dalam kemiskinan absolut biasanya mereka mempunyai

pendapatan dibawah garis kemiskinan. Artinya, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan minimumnya seperti pangan, sandang dan papan.

- **Kemiskinan Relatif**

Yaitu apabila seseorang atau sekelompok orang yang berpenghasilan lebih rendah dari individu seseorang atau kelompok masyarakat lain yang tidak memperhatikan apakah seseorang individu atau kelompok tersebut memiliki kategori miskin absolut atau tidak. Semakin besar tingkat ketimpangan seseorang atau kelompok antara dua golongan yang berbeda yaitu golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga golongan kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan

- **Kemiskinan Struktural**

Yaitu apabila sikap individu seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki kehidupannya secara layak yang biasanya disebabkan oleh faktor budaya. Kemiskinan struktural juga diartikan sebagai kondisi atau situasi seorang individu atau kelompok miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan.

- **Kemiskinan Kurtural**

Yaitu situasi dimana suatu individu atau kelompok menganggap bahwa mereka miskin karena budaya dan turunan sehingga mereka pasrah

dengan keadaan yang pada akhirnya setiap aktifitas untuk berusaha bangkit dan maju berkurang.

Golongan ini biasanya muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial yang memungkinkan seseorang individu atau kelompok miskin dapat bekerja. Biasanya, golongan ini berprofesi sebagai buruh tani pemulung dan lain-lain, yang mereka termasuk golongan yang tidak terpelajar dan tidak mempunyai keterampilan yang terlatih. Kemiskinan struktural ini juga muncul dari adanya hegemoni dan justru karena adanya kebijakan pemerintah atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

2.1.3. Penyebab Kemiskinan

Masalah kemiskinan memang sudah umum terjadi di setiap negara berkembang. Pada umumnya penyebab kemiskinan pasti menjadi momok besar untuk pemerintah untuk bisa mengatasinya dan menanggulunginya. Ada beberapa penyebab kemiskinan, yaitu: Pertumbuhan penduduk yang tidak merata, angkatan kerja dan pengangguran, pendidikan yang rendah, distribusi yang tidak merata. Secara umum penyebab kemiskinan dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu:

1. Kemiskinan Struktural

Adalah suatu penurunan produktifitas dan mobilitas masyarakat di lingkup masyarakat yang terjadi karena disebabkan oleh suatu kebijakan, peraturan dan lembaga yang tanpa disadari masyarakat.

2. Kemiskinan Kultural

Adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sekelompok masyarakat karena tidak mau berusaha untuk memperbaiki kondisi kehidupannya yang layak meskipun ada pihak lain yang berusaha untuk memperbaiki taraf hidup layaknya dan juga pengaruh dalam nilai-nilai yang tidak produktif di lingkup masyarakat, tingkat pendidikan yang begitu rendah dan kondisi kesehatan yang buruk.

3. Kemiskinan Alamiah

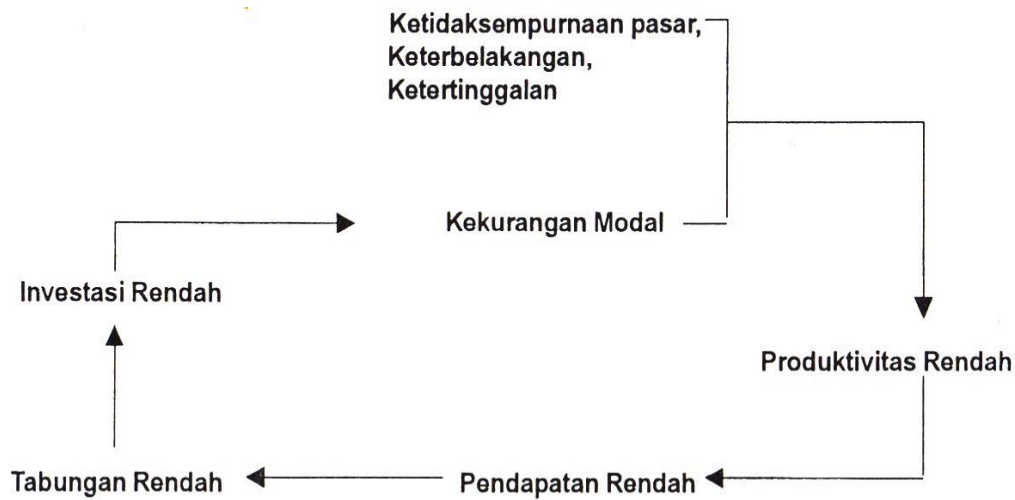
Adalah suatu daerah yang menunjukkan suatu kondisi alam geografis yang tidak mendukung masyarakat untuk bisa berkembang dan tidak mempunyai pilihan banyak untuk memperbaiki taraf kehidupan yang layak.

Pertumbuhan penduduk yang tidak merata meningkat setiap 10 tahun menurut hasil sensus. Peningkatan laju jumlah penduduk ini membuat pemerintah semakin berpikir keras untuk menyelesaikan persoalan ini agar bisa terkendali. Pertumbuhan laju penduduk tidak sebanding dengan jumlah penerimaan angkatan kerja. Seseorang atau kelompok yang berpenghasilan rendah dan masih ketergantungan terhadap individu atau kelompok lain yang hidupnya dibawah garis kemiskinan.

Angkatan kerja dan pengangguran disuatu daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya dan masih kurangnya bursa kerja akan

menjadikan masyarakat banyak yang menganggur. Pada dasarnya penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu angkatan yaitu angkatan tenaga kerja dan bukan angkatan kerja. Biasanya masyarakat dari golongan bukan angkatan tenaga kerja adalah penduduk yang sudah berumur dan dalam golongan angkatan kerja atau yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Setiap negara mempunyai batasan usia angkatan kerja yang berbeda-beda.

Tingkat pendidikan yang rendah akan menaikkan tingkat pengangguran dan juga akan menurunkan keterampilan dan produktifitas seseorang dalam melakukan pekerjaan yang bermartabat. Rendahnya kualitas pendidikan suatu negara adalah penyebab kemiskinan yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Untuk itu harus ada perkembangan ekonomi terutama dibidang industri. Dibidang ini biasanya banyak menyerap banyak tenaga kerja yang mempunyai skill dan keterampilan. Apabila seseorang produktivitasnya rendah maka menyebabkan upah yang diterima rendah. Upah yang didapat berakibat akan berdampak langsung kepada konsumsi, tabungan maupun investasi seperti yang digambarkan dari lingkaran setan kemiskinan. Inilah gambaran lingkaran setan kemiskinan.



Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan.

Sumber : Mudrajad (2006)

2.1.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan

2.1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tertentu. PDRB yaitu sejumlah penjumlahan antara nilai output bersih perekonomian yang biasanya akan muncul dari seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu daerah tertentu. PDRB juga dapat didefinisikan juga sebagai nilai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian dan juga pada periode tertentu. Besar kecilnya PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Perhitungan PDRB bisa melalui dua macam harga, yaitu harga berlaku dan juga harga konstan. Yang dimaksud harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara, harga

konstan yaitu dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Perhitungan PDRB dapat dilihat dari empat metode pendekatan ini, yaitu:

1. Pendekatan Pendapatan,

Yang merupakan nilai tambah dari kegiatan ekonomi yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah, gaji, keuntungan usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung. Dan semua penjumlahan komponennya yang dapat dilakukan, yaitu: konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta, ekspor netto dan lain lain.

2. Pendekatan Produksi

Yang merupakan pendekatan nilai tambah dimana Nilai Tambah Bruto (NTB) dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Pendekatan produksi adalah jumlah hasil awal dan akhir barang dan jasa yang dihasilkan berbagai produsen produk disuatu daerah tertentu.

3. Pendekatan Pengeluaran

Yaitu untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan tertentu dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Metode ini juga menjumlahkan hasil yang didapatkan oleh faktor produksi dalam

suatu daerah tertentu, hal ini juga bisa disebut gaji, upah dan lain-lain.

Perhitungan ini memiliki 6 komponen, yaitu:

- a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
- b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
- c. Pembentukan Modal tetap Domestik Bruto
- d. Perubahan Inventori
- e. Ekspor Barang dan Jasa
- f. Impor Barang dan Jasa

Selain itu, PDRB juga sebagai indikator yang mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan juga sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi bisa menjadi salah satu strategi utama pemerintah yang ampuh. Karena pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja dan menciptakan sumber daya manusia yang handal. Dengan adanya lapangan kerja berarti dapat memunculkan perekonomian yang berefek positif dan memperbaiki kualitas hidup.

2.1.4.2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks pembangunan manusia yang digunakan untuk mengukur hasil dari pembangunan suatu wilayah dan mengukur rata-rata pencapaian suatu negara dalam tiga hal ini, yaitu: Usia harapan hidup, Pendidikan dan Standar Hidup Layak.

IPM mengukur keseluruhan dari seluruh daerah dalam tiga dimensi, yaitu: angka harapan hidup, pendidikan dan pendapatan perkapita.

IPM juga berperan dalam meningkatkan produktifitas seseorang untuk meningkatkan pembangunan. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan akan meningkatkan skill atau kemampuan seseorang dalam mendorong produktifitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Apabila nilai IPM tinggi berarti kualitas sumber daya manusia disuatu wilayah baik, sehingga masyarakat yang memilikinya mempunyai produktifitas yang tinggi. Produktifitas yang tinggi akan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat yang kemudian bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Apabila sebaliknya ketika IPM turun berarti kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut tidak baik, ketika kemiskinan naik dan jumlah perkapita di wilayah tersebut juga naik maka bisa dibilang di wilayah tersebut mengalami ketimpangan.

2.1.4.3. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk disuatu daerah atau wilayah tertentu dapat mendorong peningkatan ekonomi. Meskipun demikian, pertumbuhan penduduk dapat menjadi faktor pendorong pembangunan dan bisa juga menjadi efek yang negatif bagi pembangunan. Faktor penting dalam masalah kemiskinan adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu: kelahiran, kematian, dan perpindahan. Menurut Sukirno (1985),

pertumbuhan penduduk disuatu wilayah tertentu menjadi faktor pendorong pembangunan dan faktor penghambat pembangunan. Faktor pendorong pertumbuhan penduduk yaitu bertambahnya penduduk suatu wilayah akan menambah jumlah tenaga kerja. Sedangkan faktor penghambatnya adalah penurunan produktifitas akan menyebabkan timbulnya pengangguran dan kemiskinan di masyarakat.

2.1.4.4. Pengangguran

Pengangguran adalah suatu masalah makroekonomi yang secara tidak langsung mempengaruhi manusia. Artinya bagi seseorang yang kehilangan pekerjaannya akan menurunkan psikologisnya. Pengangguran juga dapat di artikan jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat dikelompokan dalam jenis kelamin, tingkat keterampilan seseorang, pendidikan dan lain-lain. Ada tiga jenis penyebab pengangguran, yaitu:

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lapangan pekerjaan. Penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Ada beberapa kemungkinan yang di akibatkan pengangguran struktural, yaitu:

- Akibat permintaan berkurang
- Akibat kemajuan dan penggunaan teknologi
- Akibat kebijakan pemerintah

c. Pengangguran Konjungtural

Pengangguran yang disebabkan oleh perubahan gelombang naik turunnya siklus ekonomi.

Macam-macam pengangguran berdasarkan jam kerjanya, yaitu:

- Pengangguran Terbuka

Adalah seorang individu atau kelompok yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan.

- Pengangguran Terselubung

Adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya atau tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.

- Setengah Menganggur

Adalah tenaga kerja individu atau kelompok yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan pekerjaan atau pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam 7 hari.

2.1.4.4.1 Dampak Pengangguran

Dilihat dari segi sepihak, pengangguran dapat menimbulkan berbagai masalah kompleks, baik ekonomi maupun sosial. Keadaan pendapatan yang rendah menyebabkan para pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu belaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sadowo Sukirno, 2004).

Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan percepatan penyiapan lapangan kerja, sehingga timbullah pengangguran. Terjadinya pengangguran juga berdampak pada hilangnya mata pencaharian dan pendapatan masyarakat. Jika dibiarkan berlarut-larut pengangguran akan semakin tinggi dan hilangnya keterampilan angkatan kerja. Selain itu perekonomian suatu negara akan terganggu karena membuat pertumbuhan ekonomi semakin lamban, masyarakat tidak dapat memaksimumkan pendapatannya.

2.1.4.4.2 Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Lincolind Arsyad (1997), menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap

atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap disektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin. Sedangkan orang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada pekerjaan diperkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama halnya banyak individu yang mungkin bekerja sehari penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin.

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk. Kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada

kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 2004).

2.1.5. Penelitian Terdahulu

Wongdesmiwati (2009), Penelitian ini tentang “Pertumbuhan ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. Menggunakan metode analisis regresi berganda dari tahun 1990 hingga sampai tahun 2004. Dimana Y_i adalah Jumlah Penduduk Miskin, $X1_i$ adalah jumlah penduduk Indonesia per-tahun, $X2_i$ adalah PDB yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi, $X3_i$ adalah angka harapan hidup, $X4_i$ adalah persentase angka melek huruf, $X5_i$ adalah persentase penggunaan listrik, $X6_i$ adalah persentase konsumsi makanan. Hasil dari penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel angka harapan hidup, penggunaan listrik, dan konsumsi makanan tidak signifikan berpengaruh terhadap penduduk miskin.

Utami (2011) Penelitian ini tentang “pengaruh tingkat kemiskinan dan kebijakan penanggulangan di provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis data panel. Variabel yang digunakan adalah kependudukan, PDRB, Pendidikan, kesehatan dan Pengangguran. Dari lima variabel yang digunakan, semua signifikan

terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Variabel kependudukan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Widiastuti (2010), Penelitian ini tentang “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008”. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan. Artinya semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal di suatu wilayah tertentu maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Dengan demikian semua variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada daerah dan objek yang diteliti dimana penelitian ini menggunakan

data panel diseluruh kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesa adalah kesimpulan sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih belum pasti kebenarannya. Sesuai dengan latar belakang dan tujuan penelitian diatas, sehingga dapat disusun kerangka teori yang menjadi dasar penelitian, yang bahwasanya menunjukkan pada suatu persamaan bagaimana Pengangguran, IPM, PDRB dan Jumlah penduduk mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di provinsi D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan dari landasan teori diatas maka hipotesis yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga Pengangguran (PGRN) berpengaruh positif terhadap kemiskinan di provinsi D.I.Yogyakarta.
2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di provinsi D.I.Yogyakarta.
3. Diduga Produk Domestik Bruto Perkapita (CAPITA) berpengaruh positif terhadap kemiskinan di provinsi D.I.Yogyakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data ini berkaitan dengan data yang diambil dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan berupa data deret waktu (*time series data*) untuk kurun waktu 2010-2014 dan data kerat lintang (*cross section data*) yang meliputi 5 Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman dan Kota Yogyakarta.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik maupun Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga bisa melalui sumber dari jurnal ilmiah, buku terkait dan juga media online.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel atau konsep yang akan diteliti adalah variabel yang dapat diukur dari bermacam-macam nilai yang akan memberikan gambaran dan fenomena secara nyata. Ada 2 variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri atas variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam variabel ini adalah Tingkat Kemiskinan

(TK) pada Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2014. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Produk (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk (JP), dan Tingkat Pengangguran (TP) di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2014. Untuk memahami variabel yang akan dianalisis, inilah definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan (TK)

Yaitu persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan dari masing-masing Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2014 dalam satuan persen.

2. Pengangguran (PGRN)

Yaitu orang-orang yang tergolong dalam angkatan kerja diatas lima belas tahun (15 >) yang tidak bekerja sama sekali, dan atau seseorang yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan yang sesuai dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat Pengangguran yang digunakan adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di wilayah Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinyatakan dalam satuan persen.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan disuatu wilayah yang tidak

bisa diukur disemua dimensi kemampuan dasar penduduk disuatu wilayah tertentu. Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi riil per kapita menurut Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam satuan persen.

4. Produk Domestik Regional Bruto per kapita (CAPITA)

Yaitu penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang dihasilkan oleh dari seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah tertentu dalam kurun waktu satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto per kapita (CAPITA) yang digunakan yaitu PDRB Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut harga konstan tahun 2000 dalam satuan jutaan dan .

3.3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan analisis data panel. Penelitian dengan menggunakan analisis data panel yang merupakan salah satu kombinasi antara data deret waktu (*time series data*) dan data kerat lintang (*cross section data*). Penelitian ini menggunakan data deret waktu selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2010-2014 dan data kerat lintang sebanyak 5 (lima) data, yaitu dari Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3.1. Analisis Data Panel

Penelitian ini menggunakan alat analisis data panel. Metode analisis ini secara umum dapat didefinisikan sebagai alat analisis satu kelompok variabel yang tidak mempunyai dimensi didalam time series dan juga cross section. Penelitian yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2010-2014 ini menggunakan time series dalam kurun waktu 5 tahun. Sedangkan 5 kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan cross section. Menurut Baltagi (1995), Ada beberapa manfaat menggunakan data panel yaitu:

1. Data panel baik untuk menganalisis yang sifatnya dinamis, seperti contohnya kemiskinan.
2. Data panel baik untuk mengukur dan mengidentifikasi efek-efek yang tidak dapat dideteksi pada data cross section maupun time series.
3. Memberikan data informatif, bervariasi, lebih efisien dan dapat mengurangi kolinieritas antar variabel.
4. Menganalisis beberapa permasalahan ekonomi yang sifatnya krusial yang biasanya tidak bisa dijawab oleh data cross section.

Ini adalah model regresi dalam bentuk log linier, yaitu:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PGRN_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 CAPITA_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Tingkat Penduduk Miskin

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien variabel independent

$PGRN_{it}$ = Pengangguran Kabupaten/Kota i tahun t

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota i tahun t

$CAPITA_{it}$ = Produk Domestik Regional Bruto per kapita Kabupaten/Kota i dan t

Ada 3 metode model yang akan menentukan estimasi data panel, yaitu:

1. Common Effect Model

Yaitu pendekatan data panel yang paling sederhana. Model ini tidak melihat atau memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini dapat digunakan dalam mengestimasi model.

2. Fixed Effect Model

Model ini menggambarkan bahwa terdapat efek antar individu dalam intersep cross section dan time series. Perbedaan itu hanya bervariasi terhadap individu namun konstan terhadap waktu dan sedangkan koefisien slopenya bernilai konstan terhadap individu maupun waktu.

3. Random Effect Model

Model ini digambarkan melalui efek spesifik dari masing-masing individu dan waktu namun efisiensi sloponya tetap konstan. Model ini juga menambahkan variabel-variabel seperti variabel gangguan error yang mungkin saja akan muncul dalam hubungan efisiensi cross section dan time series.

3.3.2. Pemilihan Metode Estimasi

Pemilihan metode harus menggunakan sebuah syarat pertimbangan statistik agar bisa mendapat hasil pengujian yang paling baik. Ada beberapa pengujian, diantaranya:

1. Chow Test

Yaitu pengujian untuk menentukan Common Effect Model dan Fixed Effect Model yang paling tepat untuk digunakan dalam mengestimasi panel data. Berdasarkan prosedur pengujiannya, inilah hipotesanya, yaitu:

Ho : Common Effect Model

Ha : Fixed Effect Model

Dari perbandingan hipotesis diatas adalah perhitungan nilai antara Probabilitas F-statistik dan F-tabel. Jika apabila hasil dari probabilitas F-statistik lebih besar dari F-tabel, maka hasil hipotesis nol diterima atau metode yang dapat dipilih adalah Fixed Effect Model dan juga sebaliknya, apabila jika hasil probabilitas F-statistik lebih kecil

dari F-tabel, maka hasil hipotesis nol ditolak atau metode Fixed Effect Model lebih baik dari Common Effect Model.

2. Hausman Test

Yaitu dalam sebuah pengujian statistik digunakan untuk memilih antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Pengujian statistik ini mencari apakah terdapat hubungan antara galat komposit dengan satu atau lebih variabel dalam model. Berdasarkan prosedur pengujiannya, inilah hipotesisnya, yaitu:

Ho : Random Effect Model

Ha : Fixed Effect Model

Jika hasil pengujian hausman menunjukkan hasil probabilitas chi-square lebih besar dari F-tabel, maka hasil hipotesis nol diterima, atau metode yang dipakai adalah Fixed Effect Model dan juga sebaliknya. Apabila jika hasil probabilitas chi-square lebih kecil maka hasil hipotesis nol ditolak atau metode yang digunakan adalah Random Effect Model.

3.3.3. Uji Asumsi Klasik dan Model Regresi

Uji ini meliputi uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. Berikut beberapa penjelasan mengenai uji asumsi klasik, yaitu yang pertama :

1. Multikolinearitas

Merupakan sebuah keadaan dimana terdapat hubungan antara linier atau korelasi dan beberapa variabel independen dalam regresi. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan uji Klien yang membandingkan dengan nilai R^2 model utama dengan regresi partial dari masing-masing variabel bebas. Jika R^2 yang dihasilkan dalam regresi tinggi maka ini adalah salah satu termasuk multikolinearitas.

Cara mendeteksi ada tidaknya uji multikolinearitas dalam model ini adalah:

- a) Mengestimasi model awal dalam persamaan sehingga mendapat nilai R^2 . Jika nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi, maka secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan terhadap variable dependen, Maka terdapat multikolinearitas.
- b) Melakukan regresi partial, menggunakan *auxiliary regression* pada masing-masing variable independen, kemudian membandingkan nilai R^2 dalam model persamaan awal dengan R^2 , pada model regresi partial.

2. Autokorelasi

Merupakan pengujian dari asumsi klasik dalam analisis regresi linier berganda. Pengujian autokorelasi bertujuan mencari apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan

pada periode t-1. Model regresi yang baik biasanya terbebas dari autokorelasi.

3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah merupakan masalah pada varian dari variabel gangguan yang tidak konstan sehingga estimator tidak lagi mempunyai varian yang minimum tetapi masih estimator yang linier dan tidak bias (BLUE) (Agus Widarjono, 2009 : 101).

Untuk menguji ada tidanya masalah heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Park. Yaitu dengan menguadratkan residual yang telah diperoleh dari regresi log linier. Kemudian residual kuadrat tersebut di regresi dengan variabel independen. Apabila dengan menggunakan uji t semua variabel tidak signifikan maka tidak terdapat masalah heterokedastisitas dan sebaliknya.

3.3.4. Uji Statistik

1. Uji F

Yaitu pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap pengaruh dari variabel independen. Jika $F_{hitung} < F_{table}$, maka H_0 gagal ditolak dan H_a ditolak. Artinya secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel devenden.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Yaitu pengujian ini bertujuan untuk mengukur garis regresi yang cocok untuk data yang digunakan atau mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi.

3. Uji T

Yaitu pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah secara individu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil dari t hitung dengan t table atau juga data dilakukan dengan membandingkan probabilitas pada derajat keyakinan tertentu.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Dalam analisis ini, penulis menggunakan data sekunder yang di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang digunakan adalah data panel yang terbentuk dari tahun 2010 sampai tahun 2014 yang mencakup 5 kabupaten/kota di provinsi D.I.Yogyakarta. Penelitian ini di buat untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel-variabel independen yang terdiri dari Pengangguran (PGRN), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Produk per kapita (CAPITA) menurut kabupaten/kota yang dapat mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan menurut kabupaten/kota.

Metode analisis yang digunakan dalam analisis ini adalah menggunakan model regresi data panel. Metode regresi data panel ini digunakan karena jenis data ini adalah data panel. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis bantu yaitu econometric E-views 9.

Variabel yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. Variabel Dependen

- a. Tingkat kemiskinan menurut kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian 3 daerah kabupaten dan 2 daerah kota yang dinyatakan dalam persen jiwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sumber BPS D.I.Yogyakarta.

2. Variabel Independen

- a. Pengangguran (PGRN) menurut kabupaten/kota di provinsi D.I. Yogyakarta (persen jiwa) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan rincian 3 daerah kabupaten dan 2 daerah kota. Sumber BPS provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4.3
Pengangguran berdasarkan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi
D.I.Yogyakarta
(persen)

| Kabupaten/Kota | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kulon Progo | 4.18 | 2.56 | 3.91 | 2.94 | 2.88 |
| Bantul | 5.42 | 3.80 | 3.60 | 3.46 | 2.57 |
| Gunung Kidul | 4.04 | 1.97 | 1.92 | 1.77 | 1.61 |
| Sleman | 7.17 | 5.25 | 5.42 | 3.38 | 4.21 |
| Kota Yogyakarta | 7.41 | 5.57 | 5.03 | 6.57 | 6.35 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta, 2015

Tabel 4.3 menunjukkan Pengangguran di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta selama tahun 2010 – 2014 dapat dilihat dari masing masing Kabupaten/Kota mengalami Flutuasi tiap tahunnya. Daerah dengan Pengangguran tertinggi adalah kota Yogyakarta sebesar 6.35%

Pada tahun 2014. Dan sedangkan daerah dengan Pengangguran terendah adalah kabupaten Gunung Kidul dengan angka sebesar 1.61% pada tahun 2014.

- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut kabupaten/kota di provinsi D.I. Yogyakarta (persen jiwa) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan rincian 3 daerah kabupaten dan 2 daerah kota. Sumber BPS provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4.4
Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta
(persen)

| Kabupaten/Kota | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kulon Progo | 68.83 | 69.53 | 69.74 | 70.14 | 70.68 |
| Bantul | 75.31 | 75.79 | 76.13 | 76.78 | 77.11 |
| Gunung Kidul | 64.20 | 64.83 | 65.69 | 66.31 | 67.03 |
| Sleman | 79.69 | 80.04 | 80.10 | 80.26 | 80.73 |
| Kota Yogyakarta | 82.72 | 82.98 | 83.29 | 83.61 | 83.78 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta, 2015

Tabel 4.4 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta pada tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada masing-masing kabupaten Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Daerah dengan IPM tertinggi adalah kota Yogyakarta dengan angka sebesar 83.78% di tahun 2014. Sedangkan daerah dengan IPM terendah adalah kabupaten Gunung Kidul dengan angka sebesar 67.03% dari tahun 2014.

- c. Produk Domestik Regional Bruto per kapita (CAPITA) atas dasar harga konstan 2010 menurut kabupaten/kota di provinsi D.I. Yogyakarta (jutaan rupiah) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

dengan rincian 3 kabupaten dan 2 kota. Sumber BPS provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel. 4.1
PDRB Perkapita Berdasarkan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta
(jutaan)

| Kabupaten/Kota | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kulon Progo | 5033073,6 | 5246146,8 | 5475148,2 | 5741660,3 | 5992787,2 |
| Bantul | 12114059,2 | 12728666,3 | 13407021,8 | 14138719,3 | 14867408,8 |
| Gunung Kidul | 8848037,9 | 9248010,9 | 9695979,8 | 10177432,5 | 10639465,7 |
| Sleman | 21481644,0 | 22645851,9 | 23957112,8 | 25367414,2 | 26740537,1 |
| Kota Yogyakarta | 17202154,0 | 18206089,7 | 19189074,8 | 20239557,7 | 21312143,8 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta, 2015

Tabel 4.1 menunjukkan Produk Domestik Regional Produk per kapita di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta selama periode 2010 – 2014 bisa dilihat masing masing dari 5 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Daerah dengan PDRB per kapita tertinggi adalah kota sleman dengan angka 26740537,1 rupiah pada tahun 2014. Sedangkan daerah dengan PDRB per kapita terendah adalah kabupaten Kulon Progo dengan angka 5992787,2 rupiah pada tahun 2014.

4.2. Pemilihan Model dan Hasil Regresi

Estimasi dalam regresi data panel ini ada terdiri dari 3 jenis model yaitu estimasi model *common effect*, estimasi model *fixed effect*, dan estimasi model *random effect*. Untuk memilih model estimasi yang maka

akan di lakukan pengujian dalam menentukan pemilihan model yang tepat. Model yang pertama untuk di estimasi adalah model *common effect* dan *fixed effect* untuk menentukan hal yang tepat dengan menggunakan metode uji likelihood ratio (Uji F). Dan selanjutnya untuk mengetahui apakah uji *fixed effect* lebih baik dari model *random effect* maka digunakan lah model hausman test. Hasil dari pengujian masing-masing model dapat dilihat dari ketepatan hasil yang didapat dan di sajikan sebagai berikut.

4.2.1. Estimasi Common Effect

Estimasi ini dilakukan dengan mengkombinasikan dengan data time series dan data cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat menggunakan metode OLS dalam mengestimasi data panel.

$$(TK) = 7.579954 - 0.000271*(PGRN) - 0.001822*(IPM) + 0.007646*(CAPITA)$$

$$N = 5 \quad R^2 = 0.491603 \quad F = 6.446439$$

Tabel 4.5

Hasil Estimasi Common Effect

Dependent Variable: (TK?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 06/28/16 Time: 14:55
 Sample: 2010 2014
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 5
 Total pool (unbalanced) observations: 24

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| C | 7.579954 | 0.008573 | 884.2112 | 0.0000 |
| (PGRN?) | -0.000271 | 0.000261 | -1.037129 | 0.3121 |
| (IPM?) | -0.001822 | 0.000416 | -4.385469 | 0.0003 |
| (CAPITA?) | 0.007646 | 0.002076 | 3.682448 | 0.0015 |
| R-squared | 0.491603 | Mean dependent var | | 7.606926 |
| Adjusted R-squared | 0.415343 | S.D. dependent var | | 0.000702 |
| S.E. of regression | 0.000536 | Akaike info criterion | | -12.07214 |
| Sum squared resid | 5.76E-06 | Schwarz criterion | | -11.87580 |
| Log likelihood | 148.8657 | Hannan-Quinn criter. | | -12.02005 |
| F-statistic | 6.446439 | Durbin-Watson stat | | 1.700175 |
| Prob(F-statistic) | 0.003128 | | | |

4.2.1.1. Hipotesis Uji T

1. Estimasi terhadap Variabel PGRN

Bila di lihat dari hasil koefisien variabel PGRN sebesar -0.000271 dan t-hitung sebesar -1.037129 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.3121 tidak signifikan terhadap $\alpha = 5\%$, sehingga secara statistik variabel PGRN tidak signifikan mempengaruhi variabel TK (Ho diterima dan menolak H1), maka dalam model estimasi *common effect*, variabel PGRN tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Estimasi terhadap Variabel IPM

Bila di lihat dari hasil koefisien variabel IPM sebesar -0.001822 dan t-hitung sebesar -4.385469 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.0003 signifikan terhadap $\alpha = 1\%$, sehingga secara statistik variabel IPM signifikan mempengaruhi variabel TK (H0 ditolak dan menerima H1), maka dalam model estimasi *common effect*, variabel IPM

mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Estimasi terhadap Variabel CAPITA

Bila dilihat dari hasil koefisien variabel CAPITA sebesar 0.007646 dan t-hitung sebesar 3.682448 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.0015 signifikan terhadap $\alpha = 1\%$, sehingga secara statistik variabel CAPITA signifikan mempengaruhi variabel TK (H_0 ditolak dan menerima H_1), maka dalam model estimasi *common effect*, variabel CAPITA mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2.1.2. Hipotesis Uji F

Fungsi dari Uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen di pengaruhi oleh variabel independen atau tidak. Bila dilihat dari hasil F-hitung yang sebesar 6.446439 dan probabilitas sebesar 0.003128 signifikan terhadap $\alpha = 5\%$, sehingga secara statistik variabel independen dalam estimasi *common effect* mempengaruhi variabel TK dalam tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2.1.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil pengujian dari koefisien determinasi (R^2) dapat di lihat bahwa variabel dependen dapat di pengaruhi oleh variabel independen.

Dari hasil table diatas, R^2 sebesar 0.491603 sehingga variabel dependen dapat dipengaruhi oleh masing masing variabel independen dengan nilai 49% dan sisanya 51% yang dapat di jelaskan oleh variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhinya. Sedangkan nilai dari koefisien determinasi yang di sesuaikan dengan nilai sebesar 0.415343 (41%) atau nilainya lebih rendah dari koefisien (R^2).

4.2.2. Estimasi Fixed Effect

Estimasi *Fixed Effect* biasanya hanya menggambarkan perbedaan antara intersep dan slope. Karena pengaruh dari estimasi model *common effect* sangat berbeda dengan fakta yang ada.

Tabel 4.6

Hasil Estimasi Fixed Effect

Dependent Variable: (TK?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 06/28/16 Time: 14:56
 Sample: 2010 2014
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 5
 Total pool (unbalanced) observations: 24

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 7.582300 | 0.012241 | 619.3936 | 0.0000 |
| (PGRN?) | 0.000113 | 0.000489 | 0.231404 | 0.8199 |
| (IPM?) | -0.001883 | 0.000456 | -4.127445 | 0.0008 |
| (CAPITA?) | 0.005929 | 0.003209 | 1.847527 | 0.0832 |
| Fixed Effects (Cross) | | | | |
| _KP--C | 0.000134 | | | |
| _BTL--C | -0.000140 | | | |
| _GK--C | -0.000373 | | | |
| _SL--C | 4.93E-06 | | | |
| _YK--C | 0.000467 | | | |

| Effects Specification | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| Cross-section fixed (dummy variables) | | | |
| R-squared | 0.531274 | Mean dependent var | 7.606926 |
| Adjusted R-squared | 0.326207 | S.D. dependent var | 0.000702 |
| S.E. of regression | 0.000576 | Akaike info criterion | -11.82005 |
| Sum squared resid | 5.31E-06 | Schwarz criterion | -11.42737 |
| Log likelihood | 149.8406 | Hannan-Quinn criter. | -11.71587 |
| F-statistic | 2.590729 | Durbin-Watson stat | 1.663270 |
| Prob(F-statistic) | 0.054434 | | |

4.2.2.1. Hipotesis Uji T

1. Estimasi terhadap variabel PGRN

Bila di lihat dari hasil koefisien variabel PGRN sebesar 0.000113 dan t-hitung sebesar 0.231404 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.8199 tidak signifikan terhadap $\alpha = 5\%$, sehingga secara statistik variabel PGRN tidak signifikan mempengaruhi variabel TK (Ho diterima dan menolak H1), maka dalam model estimasi *fixed effect*, variabel PGRN tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Estimasi terhadap variabel IPM

Bila di lihat dari hasil koefisien variabel IPM sebesar 0.005929 dan t-hitung sebesar -4.127445 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.0008 signifikan terhadap $\alpha = 1\%$, sehingga secara statistik variabel IPM signifikan mempengaruhi variabel TK (Ho ditolak dan menerima H1), maka dalam model estimasi *fixed effect*, variabel IPM

mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Estimasi terhadap variabel CAPITA

Bila di lihat dari hasil koefisien variabel CAPITA sebesar 0.000113 dan t-hitung sebesar 1.847527 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.0832 tidak signifikan terhadap $\alpha = 5\%$, sehingga secara statistik variabel CAPITA tidak signifikan mempengaruhi variabel TK (Ho diterima dan menolak H1), maka dalam model estimasi *fixed effect*, variabel CAPITA tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2.2.2. Hipotesis Uji F

Fungsi dari Uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen atau tidak. Bila dilihat dari hasil F-hitung yang sebesar 2.590729 dan probabilitas sebesar 0.054434 signifikan terhadap $\alpha = 1\%$, sehingga secara statistik variabel independen dalam estimasi *fixed effect* tidak mempengaruhi variabel TK dalam tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2.2.3. Koefisien determinasi (R^2)

Dari hasil pengujian dari koefisien determinasi (R^2) dapat di lihat bahwa variabel dependen dapat di pengaruhi oleh variabel independen.

Dari hasil tabel diatas, R^2 sebesar 0.531274 sehingga variabel dependen dapat dipengaruhi oleh masing masing variabel independen dengan nilai 53% dan sisanya 47% yang dapat di jelaskan oleh variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhinya. Sedangkan nilai dari koefisien determinasi yang di sesuaikan dengan nilai sebesar 0.326207 (32%) atau nilainya lebih rendah dari koefisien (R^2).

4.2.3. Uji Likelihood Ratio (*Fixed Effect Signification*)

Pengujian ini bertujuan untuk memilih model yang sesuai digunakan untuk mencari hasil yang tepat antara model *common effect* atau model *fixed effect*. Uji hipotesis (H_0) yaitu menggunakan estimasi model *common effect* dan hipotesis (H_1) yaitu menggunakan estimasi model *fixed effect*. Uji ini menggunakan distribusi chi-square, bila nilai hitung lebih besar daripada nilai tabel maka model yang digunakan adalah model *fixed effect* dan apabila nilai hitung lebih kecil dari pada nilai tabel maka maka model yang digunakan dalam estimasi ini adalah model *common effect*.

Tabel 4.7

Uji Estimasi Likelihood Ratio

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: POOLDATAE12
Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| Cross-section F | 0.338548 | (4,16) | 0.8480 |
| Cross-section Chi-square | 1.949889 | 4 | 0.7450 |

Cross-section fixed effects test equation:
 Dependent Variable: (TK?)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/28/16 Time: 14:57
 Sample: 2010 2014
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 5
 Total pool (unbalanced) observations: 24

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | 7.579954 | 0.008573 | 884.2112 | 0.0000 |
| (PGRN?) | -0.000271 | 0.000261 | -1.037129 | 0.3121 |
| (IPM?) | -0.001822 | 0.000416 | -4.385469 | 0.0003 |
| (CAPITA?) | 0.007646 | 0.002076 | 3.682448 | 0.0015 |
| R-squared | 0.491603 | Mean dependent var | 7.606926 | |
| Adjusted R-squared | 0.415343 | S.D. dependent var | 0.000702 | |
| S.E. of regression | 0.000536 | Akaike info criterion | -12.07214 | |
| Sum squared resid | 5.76E-06 | Schwarz criterion | -11.87580 | |
| Log likelihood | 148.8657 | Hannan-Quinn criter. | -12.02005 | |
| F-statistic | 6.446439 | Durbin-Watson stat | 1.700175 | |
| Prob(F-statistic) | 0.003128 | | | |

Jadi nilai distribusi chi-square dari tabel di atas adalah sebesar 1.949889 dan probabilitasnya sebesar 0.7450 yang nilainya lebih dari 5%, sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan menolak H_1 . Maka model yang sesuai untuk digunakan adalah model estimasi *common effect*.

4.2.4. Pengaruh Pengangguran (PGRN) terhadap kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi pengangguran, hasil regresi dari probabilitas PGRN tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari badan pusat statistik, pada tahun 2010 tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 5.69%, pada tahun 2012 tingkat pengangguran di

Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 3,97%, dan pada tahun 2014 tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 3.33%. Terlihat bahwa tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Data dapat di lihat pada tabel 4.5

4.2.5. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit dari indeks kesehatan yang diukur dari rata-rata, lama sekolah, melek huruf dan indeks daya beli yang diukur dari tingkat kehidupan yang layak serta keseluruhan. Dilihat dari hasil estimasi dari tahun 2010 sampai 2014 kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan perkembangan hasil yang negatif . Dari keseluruhan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan berdasarkan perhitungan data dari BPS Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2014. Data dapat dilihat di tabel 4.5

4.2.6. Pengaruh PDRB per kapita (CAPITA) terhadap kemiskinan

Dari hasil estimasi didapatkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto per kapita (CAPITA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah salah satu permasalahan pembangunan pada setiap wilayah dan disebabkan oleh pertumbuhan

ekonomi yang belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang (Tulus Tambunan, 2001).

Tabel 4.8
Rasio Gini berdasarkan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi
D.I.Yogyakarta

| Kabupaten/Kota | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kulon Progo | 0,2659 | 0,3879 | 0,4172 | 0,3133 | 0,3817 |
| Bantul | 0,3243 | 0,3760 | 0,4055 | 0,3297 | 0,3205 |
| Gunung kidul | 0,2740 | 0,3399 | 0,3682 | 0,2663 | 0,2963 |
| Sleman | 0,3746 | 0,4174 | 0,4651 | 0,3869 | 0,4116 |
| Yogyakarta | 0,3686 | 0,3837 | 0,3698 | 0,4537 | 0,3958 |
| DIY | 0,4100 | 0,4000 | 0,4300 | 0,4390 | 0,4190 |

Sumber : susenas maret 2012 – 2017

Tabel 4.8 menunjukkan rasio gini di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta selama tahun 2010 – 2014 dapat dilihat rasio gini pada masing masing Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Daerah yang mengalami kenaikan pada tahun 2014 adalah kota Sleman dengan angka sebesar 0,4116%. Dan sedangkan daerah yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Gunung Kidul dengan angka sebesar

0,2963% pada tahun 2014. Lampiran xxiv apabila dilihat dari data nasional Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, Yogyakarta pada tahun 2010 ada di urutan kelima dengan angka sebesar 0,2826% , yang diurutan pertama adalah provinsi Gorontalo dengan angka sebesar 0,2993%. Dan pada tahun 2014 Yogyakarta mengalami kenaikan tapi masih di urutan 5 nasional dengan angka sebesar 0,2909%. Adapun Sulawesi Utara dengan 0,2944%, Sulawesi Selatan dengan angka sebesar 0,2951%, Jakarta dengan angka sebesar 0,2993%, dan di posisi pertama adalah provinsi Papua Barat dengan angka sebesar 0,3048%. Jadi Yogyakarta jadi provinsi ke-2 terbesar di pulau jawa dengan Rasio Gini tertinggi setelah Jakarta pada tahun 2014.

Sedangkan apabila dilihat dari tabel 4.5 hasil koefisien variabel yang sebesar 0.007646 dan t-hitung sebesar 3.682448, sedangkan probabilitasnya sebesar 0.0015 signifikan terhadap $\alpha = 1\%$, sehingga secara statistik variabel CAPITA signifikan mempengaruhi variabel TK (H_0 ditolak dan menerima H_1), maka dalam model estimasi *common effect*, variabel CAPITA mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data ini di lihat di tabel 4.5 yang menunjukkan peningkatan dari 5 tahun terakhir.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab IV, Maka dapat ditarik kesimpulan:

- a. Variabel Pengangguran (PGRN) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi DIY. Artinya peningkatan pengangguran tidak turut menurunkan angka kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak selalu berkaitan dengan ketenagakerjaan.
- b. Variabel Indek Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi DIY. Dari hasil regresi menunjukkan hasil yang negatif, artinya peningkatan IPM di provinsi DIY memberi pengaruh besar dalam penurunan kemiskinan.
- c. Variabel PDRB per kapita (CAPITA) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2010 – 2014. Hal ini di karenakan bahwa peningkatan PDRB per kapita yang terjadi di provinsi DIY mengalami peningkatan. Karena apabila CAPITA mengalami kenaikan maka kemiskinan akan mengalami kenaikan pula, hal ini terjadi karena adanya ketimpangan di provinsi D.I.Yogyakarta.

5.2. Implikasi dan Saran

Ada beberapa implikasi yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

- a. Pemerintah harus bisa mengontrol dan mengatur persebaran penduduk dan pemerataan pembangunan agar lebih efisien. Sehingga kedepannya tidak terjadi lagi ketimpangan penduduk yang akibatnya bisa memunculkan kemiskinan yang makin bertambah.
- b. Diharapkan kepada pemerintah yang sekarang dan yang akan datang untuk bisa meningkatkan kesejahteraan contohnya bisa melalui sektor pendidikan yang pada dasarnya pendidikan harus diutamakan dan jangan di lupakan, artinya pemerintah harus bisa menekan biaya spp atau menggratiskan tanpa biaya untuk masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik.